

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kabupaten Bogor merupakan bukan merupakan daerah yang masuk kedalam penghitungan IHK di Jawa Barat, namun terkait perkembangan harga kebutuhan pokok dan penting setiap minggu dapat dilihat melalui rilis yang dikeluarkan oleh BPS yaitu IPH series. (Indeks Perkembangan Harga).

- Nilai IPH April Tahun 2026 yaitu M1 : -0.57 dengan andil Cabai Rawit(-0,3735), Daging Sapi(-0,2971), Cabai Merah(-0,0707). April M2: -0.72 dengan andil cabai rawit(-0,3176), daging sapi(-0,2971), telur ayam ras(-0,0927). April M3 : -0.85 dengan andil cabai rawit(-0,3085), daging sapi(-0,2971), telur ayam ras(-0,1559). April M4 : -0.91 dengan andil Cabai Rawit(-0,3632), Daging Sapi(-0,2478), Telur Ayam Ras(-0,1991) dan April M5 : -0.86 dengan andil Cabai Rawit(-0,4197), Telur Ayam Ras(-0,2286), Daging Ayam Ras(-0,2032).
- Pada April 2026, IPH Kabupaten Bogor menunjukkan tren **deflasi** sepanjang bulan, dengan nilai **-0,57** (Minggu I), **-0,72** (Minggu II), **-0,85** (Minggu III), **-0,91** (Minggu IV), dan **-0,86** (Minggu V). Deflasi terutama dipengaruhi oleh penurunan harga **cabai rawit**, yang secara konsisten menjadi penyumbang utama, diikuti oleh **daging sapi**, **telur ayam ras**, dan **daging ayam ras**. Kondisi ini mencerminkan normalisasi harga pasca-HBKN Idulfitri seiring menurunnya permintaan masyarakat serta tetap terjaganya pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan di Kabupaten Bogor.
- Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kabupaten Bogor pada bulan April 2026 dari 11 komoditas yang dipantau harganya setiap minggu di tingkat pedagang, hampir seluruh komoditas mengalami penurunan harga, kecuali pada komoditas Beras Medium (Naik 0,24%), Minyak Kita (Naik 0,073%), Gula Pasir(Naik 0,74%), dan Kacang Kedelai.
- Nilai IPH Mei 2026 yaitu M1 : 0.48 dengan andil daging sapi (0.7549), cabai merah (0.2924), bawang merah (0.0105), M2:0.49 dengan andil daging sapi (0,7549), cabai merah (0,3422), bawang merah (0,0105) M3 : 0.49 dengan andil daging sapi (0,7549), cabai merah (0,3422), bawang merah (0,0105)
- Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kabupaten Bogor pada bulan Mei 2026 dari 11 komoditas yang dipantau harganya setiap minggu di tingkat pedagang, hampir seluruh komoditas mengalami Kenaikan Harga, kecuali pada komoditas Beras Premium (Turun 0,45%), Telur Ayam Ras (Turun 0,38%), Bawang Putih (Turun 1,83%), Daging Ayam Ras (Turun 0,55%) dan Kedelai (Turun0,18%).
- Pada Mei 2026, IPH Kabupaten Bogor menunjukkan **inflasi yang relatif stabil**, dengan nilai **0,48** pada Minggu I dan **0,49** pada Minggu II hingga Minggu III. Kenaikan IPH terutama dipengaruhi oleh **daging sapi** sebagai komoditas dengan andil terbesar, diikuti **cabai merah** dan **bawang merah**. Meskipun beberapa komoditas seperti beras premium, telur ayam ras, bawang putih, daging ayam ras, dan kedelai mengalami penurunan harga, kenaikan harga daging sapi dan cabai merah memberikan tekanan yang lebih besar sehingga IPH tetap berada pada zona positif. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan harga pada Mei 2026 masih terkendali dan didominasi oleh kenaikan pada beberapa komoditas pangan strategis.
- Nilai IPH Juni 2026 yaitu M1 : -0.23 dengan andil daging ayam ras (-0.3515), telur ayam ras (-0.0633), bawang putih (-0.018). M2 : -0.09 dengan andil daging ayam ras (-0,3515), telur ayam ras(-0,0633), bawang putih(-0,0222). M3 : -0.03 dengan andil Daging Ayam Ras(-0,3788), Cabai Merah(-0,104), Telur Ayam Ras(-0,0732). M4 : -0.07 dengan andil

Daging Ayam Ras (-0,4203), Cabai Merah (-0,2213), Telur Ayam Ras (-0,0991)

- Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kabupaten Bogor pada bulan Juni 2026 dari 11 komoditas yang dipantau harganya setiap minggu di tingkat pedagang, hampir hampir seluruh komoditas mengalami Penurunan Harga, kecuali pada komoditas Gula Pasir (Naik 0,09%), dan Bawang Putih (Naik 0,65%), sedangkan untuk komoditas Beras Premium, Minyak Kita, Daging Sapi dan Jagung Pipilan tidak mengalami perubahan harga.
- Pada Juni 2026, IPH Kabupaten Bogor berada pada zona **deflasi**, dengan nilai **-0,23** pada Minggu I, **-0,09** pada Minggu II, **-0,03** pada Minggu III, dan **-0,07** pada Minggu IV. Deflasi terutama dipengaruhi oleh penurunan harga **daging ayam ras** sebagai penyumbang andil terbesar di seluruh minggu pengamatan, diikuti **telur ayam ras**, **cabai merah**, dan **bawang putih**. Kondisi ini sejalan dengan perkembangan harga kebutuhan pokok yang menunjukkan sebagian besar komoditas mengalami penurunan harga, sementara hanya gula pasir dan bawang putih yang mengalami kenaikan, serta beras premium, Minyakita, daging sapi, dan jagung pipilan relatif stabil. Secara umum, kondisi tersebut mencerminkan pasokan pangan yang memadai dan tekanan harga yang tetap terkendali selama Juni 2026.
- Pada **Triwulan II Tahun 2026 (April-Juni)**, perkembangan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Bogor secara umum menunjukkan kondisi yang **terkendali**. Pada April terjadi **deflasi** yang cukup dalam sebagai dampak normalisasi harga pasca-Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri, terutama dipengaruhi oleh penurunan harga cabai rawit, daging sapi, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Memasuki Mei, tekanan harga kembali meningkat namun masih dalam batas wajar, ditandai dengan IPH yang berada pada kisaran **0,48-0,49**, didorong oleh kenaikan harga daging sapi, cabai merah, dan bawang merah. Selanjutnya pada Juni, IPH kembali berada pada zona **deflasi** akibat penurunan harga daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai merah, seiring membaiknya pasokan dan normalnya permintaan masyarakat.
- Secara keseluruhan, perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting selama Triwulan II relatif stabil dengan pasokan yang terjaga dan distribusi yang lancar. Harga barang lainnya dan jasa juga tidak menunjukkan gejala yang signifikan sehingga tekanan inflasi daerah tetap terkendali.
- Adapun yang perlu diwaspadai meliputi potensi kenaikan harga komoditas hortikultura akibat faktor cuaca yang dapat memengaruhi produksi, meningkatnya permintaan menjelang HBKN berikutnya, serta fluktuasi harga pangan nasional yang dapat berdampak pada harga di daerah. Oleh karena itu, penguatan koordinasi TPID, pemantauan harga dan stok secara berkala, serta pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah apabila diperlukan perlu terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

◦ **Tingginya volatilitas harga komoditas hortikultura**

Komoditas hortikultura, khususnya cabai merah dan cabai rawit, memiliki karakteristik harga yang sangat fluktuatif karena dipengaruhi oleh musim panen, curah hujan, serangan hama, dan ketersediaan pasokan. Pada Triwulan II Tahun 2026, kedua komoditas tersebut menjadi penyumbang utama perubahan IPH, baik saat terjadi deflasi maupun potensi inflasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas harga komoditas hortikultura masih menjadi tantangan utama dalam pengendalian inflasi daerah.

- **Ketergantungan pasokan beberapa komoditas dari luar daerah**

Kabupaten Bogor belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan seluruh komoditas pangan dari produksi lokal. Komoditas seperti daging sapi, bawang putih, dan sebagian cabai masih bergantung pada pasokan dari daerah lain. Apabila terjadi gangguan distribusi, cuaca ekstrem di daerah pemasok, atau kenaikan harga di tingkat nasional, maka harga di Kabupaten Bogor akan ikut terdampak. Ketergantungan ini menyebabkan pengendalian harga menjadi lebih sulit karena dipengaruhi oleh faktor di luar kewenangan pemerintah daerah.

- **Belum optimalnya keseimbangan antara pasokan dan permintaan**

Setelah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri, permintaan masyarakat terhadap beberapa komoditas pangan, seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan daging sapi, mengalami penurunan cukup signifikan. Sementara itu, pasokan tetap melimpah sehingga terjadi penurunan harga yang cukup tajam. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keseimbangan antara produksi, distribusi, dan kebutuhan pasar masih perlu diperkuat agar fluktuasi harga tidak terlalu ekstrem dan tidak merugikan produsen maupun konsumen.

- **Belum optimalnya sistem pemantauan dan intervensi harga secara dini**

Meskipun pemantauan harga telah dilakukan secara rutin melalui TPID, masih diperlukan penguatan sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk mendeteksi potensi gejolak harga lebih cepat. Dengan informasi yang lebih cepat dan akurat, pemerintah daerah dapat segera melakukan langkah antisipatif, seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, fasilitasi distribusi, atau koordinasi dengan daerah pemasok sebelum terjadi lonjakan harga yang lebih besar.

- **Adanya risiko eksternal yang memengaruhi stabilitas harga**

Stabilitas harga pangan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi di Kabupaten Bogor, tetapi juga oleh faktor eksternal, seperti perubahan iklim yang memengaruhi produksi pertanian, kenaikan biaya transportasi dan distribusi, serta dinamika harga pangan nasional. Risiko-risiko tersebut dapat menyebabkan perubahan harga yang sulit diprediksi sehingga diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, Bank Indonesia, Bulog, dan instansi terkait untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

. Keterjangkauan Harga:

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor secara berkala memantau harga barang kebutuhan pokok untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga. Pemantauan ini membantu mendeteksi fluktuasi harga sejak dini, sehingga langkah

intervensi dapat dilakukan dengan cepat, seperti operasi pasar atau pembentukan cadangan pangan. Selain itu, informasi pasar yang akurat disampaikan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mencegah spekulasi. Dengan koordinasi yang lebih baik, pemantauan ini mendukung kebijakan yang efektif dan responsif dalam menjaga kestabilan harga di pasar. Pemantauan dan pasokan setiap hari melalui aplikasi SIDIRGA yang terintegrasi dengan SiLINDA Jawa Barat.

2. Pemantauan harga di pasar rakyat dan retail modern sebanyak 3 kali terkait harga dan ketersediaan barang pokok penting (sidak pasar)
3. Melaksanakan Gelar Pangan Murah dengan komoditas beras SPHP, beras medium, beras premium, telur ayam, daging ayam ras, minyak goreng, gula pasir, cabe merah keriting, cabe rawit, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, daging sapi, cabe merah besar dan sayuran. Sampai bulan Juni 2026, Dinas Ketahanan telah melaksanakan sebanyak 261 kali Gelar Pangan Murah, dimana 234 kali sumber dana APBD kab Bogor, 1 kali APBD Provinsi dan 26 kali Mandiri. Pelaksanaan GPM tersebar di 40 Kecamatan dengan total omzet sebesar Rp 17.862.297.200,- dengan tonase 1.119,37 ton
4. Memberikan subsidi transportasi melalui Fasilitasi Distribusi Pangan sebanyak 261 kali sebesar Rp 3.534.497.000,-

Ketersediaan Pasokan:

1. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), dengan stok beras CPPD awal sebanyak 498.114,88 kg, yang sudah disalurkan 19.567,50 kg, sehingga stok CPPD yang tersisa sebanyak 478.547,38 kg
2. Penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah berupa minyak dan beras.
3. Penambahan Luas Tambah Tanam (LTT) padi berhubungan langsung dengan ketersediaan pasokan beras, yang merupakan komoditas pangan utama di Kabupaten Bogor. Peningkatan LTT padi akan menambah jumlah produksi beras, sehingga pasokan beras di pasar lebih stabil dan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada impor beras dan mencegah lonjakan harga beras yang dapat memicu inflasi pangan. Dengan pasokan beras yang lebih mencukupi, stabilitas harga pangan di Kabupaten Bogor dapat terjaga, mendukung pengendalian inflasi di daerah tersebut. Pada triwulan II, penambahan LTT Padi di Kabupaten adalah seluas 329,28 Ha. Pada bulan April seluas 9.149,21 Ha, bulan mei seluas 6.443,72 Ha dan juni seluas 5.736,35 Ha. Semua Kecamatan ada tanam, kecuali Kecamatan Bojong Gede
4. Penambahan luas panen padi berkontribusi langsung terhadap pengendalian inflasi melalui peningkatan ketersediaan pangan pokok, khususnya beras, yang merupakan komoditas dengan andil besar terhadap inflasi daerah. Dengan bertambahnya luas tanam dan panen, produksi padi meningkat sehingga pasokan beras di pasar menjadi lebih stabil dan mampu menahan tekanan harga saat permintaan naik. Ketersediaan pasokan yang memadai juga membantu menekan biaya distribusi karena ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah berkurang. Selain itu, peningkatan produksi lokal memungkinkan pemerintah daerah memiliki cadangan beras yang cukup untuk melakukan intervensi pasar, seperti operasi pasar dan kegiatan pangan murah, saat harga bergejolak. Secara keseluruhan, penambahan luas panen padi tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menjadi strategi penting dalam menjaga kestabilan harga dan mengendalikan inflasi secara berkelanjutan di tingkat daerah. Pada triwulan II, total panen Padi di Kabupaten adalah seluas 15.409,92 Ha. Pada bulan april seluas 3.850,87 Ha, bulan mei seluas 4.908,39 Ha dan juni seluas 6.650,66 Ha yang tersebar di 40 Kecamatan

Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi pertanian dan perpipaan untuk lahan pertanian.

Kelancaran Distribusi :

1. Distribusi minyak goreng, minyakita di kegiatan Gelar Pangan Murah.
2. Distribusi beras petani lokal oleh BUMD Perumda Pasar Tohaga kepada ASN dalam program beras Carita Makmur.
3. Pembangunan infrastruktur program Satu Milyar Satu Desa (Samisade) dan program lainnya.

Komunikasi Efektif:

1. Melaksanakan rakord TPID bersama Kementerian Dalam Negeri sebanyak 24 kali.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

◦ Aspek Ketersediaan Pasokan (Availability)

Upaya pengamanan pasokan melalui monitoring stok dan kerja sama antar daerah sudah berjalan cukup baik, terbukti dari stabilnya inflasi pada Maret. Namun, masih terdapat ketergantungan pada daerah pemasok sehingga rentan terhadap gangguan eksternal.

◦ Aspek Keterjangkauan Harga (Affordability)

Program operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah efektif dalam menahan lonjakan harga, tetapi pelaksanaannya belum merata dan belum sepenuhnya tepat waktu, terutama saat puncak kenaikan harga pada Februari.

◦ Aspek Kelancaran Distribusi (Distribution)

Koordinasi lintas sektor dalam menjaga distribusi sudah dilakukan, namun masih terdapat kendala logistik yang menyebabkan disparitas harga dan mempengaruhi harga di tingkat konsumen.

◦ Aspek Komunikasi Efektif (Communication)

Penyampaian informasi harga dan imbauan kepada masyarakat sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya mampu mengendalikan ekspektasi inflasi dan mencegah perilaku spekulatif di pasar.

◦ Ketepatan Waktu Intervensi

Kebijakan pengendalian inflasi masih cenderung bersifat reaktif, sehingga intervensi sering dilakukan setelah terjadi kenaikan harga, bukan sebagai langkah antisipatif.

◦ Pemerataan Pelaksanaan Program

Implementasi program pengendalian inflasi belum menjangkau seluruh wilayah secara merata,

sehingga efektivitasnya masih berbeda antar wilayah.

- Fokus pada Komoditas Strategis

Pengendalian inflasi masih terkonsentrasi pada komoditas utama seperti daging dan cabai, namun perlu penguatan pengendalian pada komoditas lain yang berpotensi memicu inflasi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- **Penguatan Pasokan dan Cadangan Pangan Daerah (Supply Management Berkelanjutan)**

Pemerintah daerah perlu membangun sistem pengamanan pasokan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan. Selain memperluas kerja sama antar daerah (KAD) dengan sentra produksi utama, perlu dilakukan kontrak pasokan jangka menengah untuk komoditas strategis seperti daging sapi, ayam, dan cabai. Optimalisasi peran BUMD pangan menjadi kunci sebagai offtaker sekaligus stabilisator harga, termasuk dalam pengelolaan cadangan pangan daerah (buffer stock) yang dapat dilepas saat terjadi gejolak harga. Dengan demikian, pemerintah memiliki instrumen nyata untuk mengintervensi pasar secara cepat dan terukur.

- **Intervensi Harga yang Antisipatif Berbasis Data (Early Warning System)**

Pengendalian inflasi harus bertransformasi dari pola reaktif menjadi antisipatif melalui pemanfaatan data harga harian dan mingguan (IPH). Diperlukan sistem **early warning** yang mampu mendeteksi potensi kenaikan harga lebih dini, sehingga operasi pasar, subsidi ongkos angkut, maupun Gerakan Pangan Murah dapat dilakukan sebelum harga melonjak. Selain itu, penentuan waktu, lokasi, dan komoditas intervensi harus berbasis analisis spasial (wilayah rawan inflasi) agar kebijakan lebih tepat sasaran dan berdampak signifikan.

- **Reformasi Rantai Distribusi dan Efisiensi Logistik**

Salah satu akar masalah inflasi daerah adalah panjangnya rantai distribusi dan tingginya biaya logistik. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyederhanaan jalur distribusi melalui penguatan konektivitas antara produsen-distributor-pasar, termasuk pemanfaatan teknologi digital (platform distribusi pangan). Pemerintah juga perlu memastikan kelancaran transportasi, khususnya pada periode krusial seperti HBKN, serta memperketat pengawasan terhadap praktik penimbunan dan kartel. Intervensi seperti subsidi transportasi atau fasilitasi distribusi langsung dari produsen ke pasar rakyat dapat menekan disparitas harga.

- **Penguatan Produksi Lokal dan Substitusi Pasokan**

Dalam jangka menengah dan panjang, stabilitas harga sangat bergantung pada kemandirian produksi daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan produksi lokal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, khususnya untuk komoditas penyumbang inflasi. Dukungan dapat berupa penyediaan benih unggul, pupuk, akses pembiayaan (KUR sektor pertanian/peternakan), serta penerapan teknologi pertanian modern (smart farming). Selain

itu, perlu didorong diversifikasi pangan dan substitusi komoditas agar tekanan permintaan tidak terpusat pada satu jenis komoditas tertentu.

- **Digitalisasi Informasi Harga dan Penguatan Kelembagaan TPID**

Transparansi harga melalui sistem informasi digital yang real-time menjadi instrumen penting dalam menekan asimetri informasi dan ekspektasi inflasi. Masyarakat dan pelaku usaha dapat mengakses harga acuan sehingga meminimalisir praktik spekulatif. Di sisi lain, TPID perlu diperkuat tidak hanya sebagai forum koordinasi, tetapi juga sebagai pusat analisis kebijakan berbasis data (data-driven policy). Rapat koordinasi rutin harus dilengkapi dengan dashboard analisis inflasi, proyeksi risiko, dan skenario kebijakan, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, presisi, dan adaptif terhadap dinamika pasar, terutama menjelang HBKN dan periode rawan inflasi lainnya.